

✓ DERAP KAMPUS...

Pemerintah Harus Cepat Tangani Asap

JOGJA-- Pemerintah diminta cepat menangani kasus asap di Pekanbaru Riau. Sebab saat ini Indonesia tengah mendapatkan protes besar-besaran dari Malaysia dan Singapura perihal kabut asap di pulau Sumatera dan Kalimantan yang telah menyebar ke kedua negara tetangga tersebut. Kedua negara tetangga tersebut telah menawarkan bantuan untuk menyelesaikan permasalahan kabut asap, namun pemerintah Indonesia tidak menanggapi tawaran tersebut.

"Padahal, kasus ini telah terjadi lebih dari satu bulan, sedangkan kasus kabut asap belum tuntas terselesaikan," ungkap dosen Ilmu Hubungan Internasional UMY, Ade Ma'ruf Wirasenjaya SIP MA di UMY, kemarin.

Menurutnya akibat kabut asap, kehidupan masyarakat Malaysia dan Singapura menjadi terganggu, terutama Singapura yang merupakan negara yang selalu mengandalkan penyelenggaraan event internasional di negaranya sebagai pemasukan negara. Pemerintah Indonesia dinilai terlalu berlebihan karena belum mau menerima bantuan yang ditawarkan negara tetangga. Padahal Indonesia telah meratifikasi AATHP (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) pada tahun 2014.

"Padahal negara-negara ASEAN dapat saling membantu ketika terjadi bencana asap. AATHP sendiri merupakan kesepakatan antar negara-negara ASEAN untuk saling membantu, menjadi supervisor, dan asistensi ketika terjadi bencana asap di salah satu negara ASEAN," jelasnya.

Mantan kepala jurusan HI UMY itu juga menekankan bahwa sudah seharusnya pemerintah menaikkan skala bencana kabut asap dari bencana lokal menjadi bencana nasional. Selama ini, permasalahan kabut asap masih dilimpahkan ke gubernur maupun pemerintah daerah setempat. "Padahal tidak semua gubernur cekatan dalam menghadapi masalah kabut asap. Dan kabut asap ini tidak hanya menjadi masalah lingkungan hidup namun juga ekonomi, social security dan persoalan ekosistem yang punah. Oleh karena itu, Presiden harus mengambil alih permasalahan ini," jelasnya. (ptu)